

Pemkot Masih Terima Bunga Hingga Desember

► Polisi Periksa Mantan Karyawan BTPN Terkait Kasus Hilangnya Dana Rp 22 Miliar

SEMARANG, TRIBUN - Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DP-KAD), Yudi Mardiana mengatakan, selama ini bunga bank deposito dari BTPN masih diterima secara lancar.

Yudi pun kaget ketika tiba-tiba sertifikat deposito Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar tak lagi diakui oleh bank BTPN.

"Bunga masuk lewat transfer ke rekening Pemkot Semarang di Bank Jateng kode 668. Pada Desember 2014 lalu bunga juga masih kami terima, tetapi kenapa sertifikat deposito Pemkot Semarang tidak diakui oleh BTPN," kata Yudi.

Yudi mengaku masih tidak habis pikir bagaimana bisa sertifikat deposito yang disimpan oleh Pemkot Semarang dianggap tidak asli oleh BTPN.

"Sertifikat itu kami simpan di lemari besi, yang bahkan tidak bisa tembus oleh apapun. Tetapi tiba-tiba saja sertifikat itu tidak berlaku," katanya.

Kuasa hukum Pemkot Semarang, John Richard menyatakan bila gugatan perdata terhadap BTPN sudah dilayangkan kepada pengadilan. "Gugatannya sudah kami ajukan dua

STORY HIGHLIGHTS

- Polisi masih terus menyelidiki kasus hilangnya dana deposito Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar
- Pihak pemkot mengaku masih menerima bunga deposito pada bulan Desember 2014.
- Namun BTPN kemudian tidak mengakui keaslian sertifikat deposito.
- Polisi sudah meminta keterangan mantan karyawan BTPN yang diduga mengetahui soal hilangnya dana pemkot.

■ KE HALAMAN 7

OJK Akan Periksa BTPN

KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat, Nelson Tampubolon mengatakan, pihaknya belum memperoleh laporan mengenai kasus raibnya dana milik Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar.

Namun, dia berjanji pihaknya segera berkoordinasi dengan pengawas yang berada di bawahnya untuk mengecek persoalan itu.

"Saya belum memperoleh informasinya. Nanti saya cek ke

pengawas," katanya, Rabu (18/3).

Terkait aturan deposito APBD pada bank swasta, dia mengemukakan hal tersebut tergantung aturan internal daerah tersebut.

"Aturan bisa atau tidak ditempatkan deposito APBD, lebih sebagai aturan internal pemerintah daerah" tuturnya.

OJK menghormati proses hukum yang dilakukan polisi. Namun,

■ KE HALAMAN 7

Ke Surabaya Kini Semakin Hemat !



~~IDR 563.000~~
IDR 475.000/nett

Diskon 10% untuk penerbangan minimal 2 orang atau pemesanan 7 hari sebelumnya**

Jadwal Penerbangan

Rute	No. Penerbangan	Keberangkatan	Kedatangan
Semarang-Surabaya	GA 359	09.05	10.05
	GA 367	17.25	18.20

Rute	No. Penerbangan	Keberangkatan	Kedatangan
Surabaya-Semarang	GA 368	07.35	08.20
	GA 366	15.45	16.40

Reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi kantor penjualan Garuda Indonesia terdekat dan Agen Perjalanan Anda

Kantor Penjualan Garuda Indonesia

Semarang Gedung BPD Jateng Lantai 1
 Jl. Pemuda 142 Telp. 081 325 381119 (Setiap hari: 05.00-20.00)
 & 024-3517007 (Setiap hari: 08.00-16.30) Fax: 024-3512525

Pekalongan Lobby Hotel Dalam
 Jl. Unip Sumoharjo 53 Telp. 0285-420777
 (Setiap hari: 08.00-17.00 Sabtu-Minggu: 09.00-15.00) Fax: 0285-436737

Kudus Hotel Gripta Lantai 2
 Jl. AKBP Agil Kusumadya 100 Telp. 0291-443747 (Setiap hari: 18.00-17.00 Sabtu-Minggu: 09.00-15.00)
 Fax: 0291-442828

Cargo Service Center
 Ruko Metro Plaza D2
 Jl. MT. Haryono No. 970 Peterongan, Semarang Telp. 024-8417942 (Senin-Jumat: 08.00-16.30)

Informasi Bandara Ahmad Yani Telp. 024-7608760 Fax: 024-7614747
Call Center 24 Jam 0804 1 807 807 / 021-2351 9999

*Harga nett sekali jalan kelas ekonomi H
 ** Diskon berlaku untuk penerbangan s/d 31 Maret 2015



Bagaimana hasil pemeriksaan polisi terhadap saksi-saksi lain terkait kasus ini?

tribunjateng.com



Pemkot Masih...

■ DARI HALAMAN 1

pekan silam. Rencananya 16 April 2015 akan sidang perdana," kata Richard.

Richard menerangkan, isi gugatan tersebut yaitu Pemkot menduga BTPN telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Pemkot Semarang kehilangan uang sebanyak Rp 22 miliar. Richard berpendapat BTPN terkesan cuci tangan dan membuat alasan yang mengada-ada.

"Saat Pemkot Semarang menyimpan dana dalam bentuk giro, BTPN mengakui adanya dana tersebut. Tetapi saat rekening giro itu mau diubah ke deposito mereka tidak mengakui adanya dana Pemkot Semarang. Padahal uang itu juga ada dalam rekening bank tersebut," kata Richard.

Richard menambahkan, pihak bank semestinya memprioritaskan nasabah sekaligus menjaga aset milik nasabah yang tersimpat di bank tersebut. Adanya dana miliaran rupiah yang raib, menurut Richard, merupakan satu indikasi pihak bank tidak bisa menjaga aset nasabah.

Dewan Belum Tahu Deposito Miliaran

DPRD Kota Semarang belum mengetahui bahwa Pemkot Semarang ternyata memiliki dana miliaran rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito ke sejumlah bank.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan selama ini belum ada laporan dari Pemkot Semarang terkait dana miliaran rupiah yang disimpan di bank.

Dewan juga belum menerima pemberitahuan secara

resmi dari pemkot terkait hilangnya uang kas daerah atau anggaran pendapatan belanja (APBD) yang disimpan dalam bentuk deposito di Bank BTPN.

"Selama ini yang ada di laporan hanya pendapatan bunga saja, sedangkan adanya deposito sebanyak miliaran rupiah itu tidak pernah dilaporkan ke dewan," kata Supriyadi, Rabu (18/3).

Dewan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait raibnya uang Rp 22 miliar milik Pemkot Semarang.

Supriyadi menyatakan, pihaknya sudah menggelar rapat pimpinan dewan dan sepakat membentuk pansus.

"Uang itu merupakan milik rakyat. DPRD berhak menanyakan bagaimana kronologisnya dan mengklarifikasi kepada Pemkot Semarang. Uang rakyat wajib dipertanyakan," kata Supriyadi.

Polisi Selidiki Tiga Rekening Baru

Informasi yang dihimpun Tribun Jateng menyebutkan, Polrestabes Semarang sudah meminta keterangan terhadap seorang mantan karyawan BTPN berinisial Au.

Seorang sumber menyebutkan bila Au telah sekali menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) di Mapolrestabes Semarang.

Au ditengarai merupakan oknum mantan karyawan BTPN yang dilaporkan oleh BTPN ke penyidik Polda Jateng. Polisi juga masih menyelidiki munculnya tiga rekening baru di BTPN yang

mengatasnamakan Pemkot Semarang. Jumlah total dana dari tiga rekening tersebut Rp 580 juta.

"Kami masih meminta keterangan sejumlah saksi, baik dari Bank maupun dari Pemkot," kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Noer Ali, mengatakan pihaknya akan menggabungkan penyelidikan terkait hilangnya uang deposito milik Pemkot Semarang di Bank BTPN senilai Rp 22 miliar.

Ditemui di Mapolda Jateng, Rabu (18/3), Noer Ali memaparkan masing-masing pihak melapor ke tempat yang berbeda.

"Terus terang begini, ada dua laporan. Pemkot Semarang lapor ke Polrestabes Semarang, sementara BTPN laporan ke Polda Jateng," ujar Noer Ali.

Noer Ali menuturkan, Pemkot Semarang melaporkan kasus raibnya uang itu ke Polrestabes Semarang. Sedangkan pihak BTPN melaporkan seorang mantan pegawainya yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan terkait raibnya deposito Pemkot Semarang itu.

"Nanti akan kami kombain mana yang benar. Sementara ini penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti. Kedua pihak kami periksa," katanya.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Djihartono mengatakan, pihaknya masih mendalami laporan Pemkot Semarang. "Masih kami dalam, beri kami waktu untuk mengungkapnya," kata Djihartono singkat. (Lyz/ape)

OJK Akan...

■ DARI HALAMAN 1

pengawas bank juga akan melakukan pengecekan ke bank yang bersangkutan seperti apa kejadiannya.

BTPN Dukung Upaya Pengusutan

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk akhirnya memberikan keterangan resmi terkait hilangnya uang milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang senilai Rp 22 miliar yang disimpan di BTPN. Meski siaran pers yang

dikirim tidak menjelaskan banyak hal, setidaknya dapat memberikan gambaran sikap BTPN.

Melalui Corporate Communications Head BTPN, Ery Yulianti, BTPN berjanji akan menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Tengah.

"Kami akan bekerja sama dan mendukung upaya penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini sampai

tuntas," kata Ery Yulianti, Rabu (18/3) malam.

Dia menambahkan, sebagai bank nasional yang memiliki reputasi panjang di industri perbankan, BTPN selalu menjalankan standar prosedur operasi dengan prinsip kehati-hatian (prudent).

"Hal itu kami lakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi keuangan yang berjalan di BTPN memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh nasabah kami," kata Ery singkat. (wan)